

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN SARANA DAN PRASARANA DI SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)

Gabriella Sonia

Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

*Corresponding author email: gabriellasonia.11@gmail.com

Article History

Received: 1 May 2026

Revised: 26 May 2026

Published: 31 May 2026

ABSTRACT

Educational facilities and infrastructure are essential elements in creating a safe and effective learning environment. However, many schools in remote and 3T areas in Indonesia still have not met the minimum requirements of the National Education Standards (SNP). This study aims to identify the main problems of educational facilities and infrastructure and to formulate a strategic intervention model based on previous studies. This research used a qualitative descriptive approach through a Systematic Literature Review (SLR) with the PRISMA framework. Articles published between 2018 and 2025 were selected from Google Scholar and Scopus. The findings show five main problems: inadequate school buildings, limited classrooms, insufficient laboratories and libraries, limited access to electricity and internet, and poor sanitation. The proposed intervention model includes regional prioritization, multi-stakeholder collaboration, and digital-based monitoring to support more equitable and evidence-based educational policy.

Keywords: *Educational Facilities And Infrastructure, National Education Standards, Education Quality, Systematic Literature Review, Intervention Model.*

Copyright © 2026, The Author(s).

How to cite: Sonia, G. (2026). Identifikasi Permasalahan Sarana dan Prasarana Di Sekolah-Sekolah Daerah Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). *NUSRA : Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1157–1171. <https://doi.org/10.55681/nusra.v7i2.6269>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

LATAR BELAKANG

Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Regulasi yang Mengaturinya

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan pedoman utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. SNP berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah, satuan pendidikan, beserta pemangku kepentingan lainnya dalam menjamin mutu atau kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Standar ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, merata, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

SNP terdiri dari delapan elemen utama yang mencakup seluruh komponen pendidikan. Elemen pertama adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yaitu tolak ukur dasar yang menggambarkan pencapaian terpadu dari aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dimiliki peserta didik setelah menuntaskan jenjang pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Elemen kedua adalah Standar Isi, yang menetapkan batas minimum mengenai cakupan materi pembelajaran yang diperlukan untuk mencapai kompetensi lulusan. Cakupan materi ini disusun berdasarkan muatan wajib sesuai peraturan perundang-undangan, landasan keilmuan, serta mempertimbangkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ditempuh. Elemen ketiga adalah Standar Proses, yaitu pedoman minimal dalam pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan guna mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar ini mencakup tiga aspek utama: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, serta evaluasi terhadap proses pembelajaran. Elemen keempat adalah Standar Penilaian Pendidikan, yaitu acuan

dasar terkait prosedur penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian ini mencakup dua bentuk utama, yakni penilaian formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, dan penilaian sumatif yang dilakukan di akhir untuk mengukur pencapaian kompetensi. Elemen kelima adalah Standar Tenaga Kependidikan, yakni ketentuan yang menetapkan kualifikasi dan persyaratan minimal bagi tenaga kependidikan di setiap jenjang pendidikan. Tenaga kependidikan yang dimaksud mencakup pendidik seperti guru dan dosen, serta berbagai peran pendukung lainnya seperti kepala sekolah, pengawas, pustakawan, laboran, staf administrasi, dan tenaga penunjang lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Elemen keenam adalah Standar Sarana dan Prasarana, yang menetapkan batas minimal ketersediaan fasilitas fisik yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Standar ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu sarana, prasarana, serta sarana dan prasarana khusus. Komponen khusus ini diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif, khususnya bagi peserta didik penyandang disabilitas, guna mendukung kebutuhan belajar mereka secara optimal. Elemen ketujuh adalah Standar Pengelolaan, yaitu pedoman dasar yang menetapkan kriteria minimal untuk merancang, melaksanakan, dan mengawasi seluruh kegiatan pendidikan di satuan pendidikan. Tujuannya adalah agar proses penyelenggaraan pendidikan berlangsung secara optimal, efisien, dan efektif. Standar ini mencakup tiga aspek utama, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Elemen kedelapan adalah Standar Pembiayaan, yakni tolak ukur dasar yang menetapkan komponen minimal dalam

aspek pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan. Standar ini mencakup dua jenis pembiayaan utama, yaitu biaya investasi dan biaya operasional.

Regulasi yang mengatur delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa: “*Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.*” Selain dalam Undang-Undang, SNP juga diperjelas melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021, yang menggantikan peraturan sebelumnya (PP Nomor 19 Tahun 2005). Regulasi ini menegaskan pentingnya standar pendidikan dalam menciptakan generasi yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Selain itu, kebijakan terkait SNP juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang terus diperbaharui untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dengan adanya SNP yang terstruktur dengan regulasi dan kebijakan yang jelas, diharapkan sistem pendidikan Indonesia dapat terus berkembang menuju kualitas yang lebih baik. Menurut ahli Carter V. Good (1973, dikutip dalam Murniarti, 2024) mengatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu keputusan yang didasarkan pada suatu sistem nilai dan penilaian terhadap faktor-faktor situasional yang beroperasi dalam satuan pendidikan serta berfungsi sebagai rencana umum untuk membimbing pengambilan keputusan terkait cara dalam mencapai tujuan pendidikan

yang diinginkan. Implementasi SNP secara konsisten akan membantu ekosistem pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

Kajian ini berfokus pada standar keenam dalam Standar Nasional Pendidikan, yaitu Standar Sarana dan Prasarana pada satuan pendidikan. Fokus tersebut dipilih karena pemenuhan fasilitas pendidikan masih menjadi salah satu persoalan yang cukup menonjol, terutama pada sekolah-sekolah di wilayah terpencil dan daerah 3T.

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana merupakan komponen fundamental dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Hermawan (2021) menyatakan bahwa keduanya termasuk dalam kategori sumber daya utama yang sangat menentukan kelancaran dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016), *sarana* diartikan sebagai alat atau media yang secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan *prasarana* merujuk pada elemen penunjang utama yang memungkinkan suatu kegiatan dapat berlangsung dengan lancar.

Dalam konteks pendidikan, sarana mencakup berbagai fasilitas yang berinteraksi langsung dengan proses belajar siswa, seperti ruang kelas, buku pelajaran, perpustakaan, dan laboratorium. Sementara itu, prasarana lebih bersifat sebagai pendukung tidak langsung, namun tetap esensial, seperti letak dan aksesibilitas lokasi sekolah, serta ketersediaan lapangan olahraga dan area penunjang lainnya (Hermawan, 2021). Keberhasilan suatu institusi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sarana dan prasarana

tersebut, tetapi juga oleh sejauh mana pengelolaan dan pemanfaatannya dapat dioptimalkan.

Sayangnya, tantangan besar masih dihadapi oleh sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil, di mana pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana sering kali belum tercapai. Keterbatasan anggaran, akses geografis, dan prioritas kebijakan menjadi beberapa faktor penghambat yang menyebabkan ketimpangan dalam kualitas fasilitas pendidikan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari semua pihak untuk mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana demi menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Pentingnya Fasilitas Sarana dan Prasarana dalam Satuan Pendidikan

Menurut Dirjen Dikdasmen Depdikbud (1997), sarana pendidikan seperti alat pembelajaran, alat peraga, dan media edukatif memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran, sehingga keberadaannya perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Asri C. Budiningsih (1995) menyatakan bahwa alat pembelajaran berfungsi sebagai penghubung yang membantu siswa dalam memahami materi, khususnya dalam transisi dari konsep yang lebih nyata (konkret) menuju pemahaman yang lebih abstrak. Selain sarana pendidikan, prasarana yang ada dalam lembaga pendidikan juga memainkan peran yang sangat penting. Dengan tersedianya fasilitas yang memadai, seperti ruangan kelas yang mencukupi atau mengakomodir jumlah siswa, lapangan olahraga yang bisa dipakai untuk kegiatan pendidikan jasmani, ketersediaan banyak buku bacaan di perpustakaan, laboratorium dengan peralatan lengkap, lab komputer

yang disertai akses internet juga merupakan elemen-elemen penting yang diperlukan satuan pendidikan untuk dipenuhi demi mencapai kualitas pendidikan yang baik. Menurut Arifin, M & Barnawi (2012), sarana dan prasarana pendidikan adalah satu kesatuan pendukung terlaksanakannya proses pembelajaran supaya berjalan dengan baik dan optimal.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kondisi sarana dan prasarana pendidikan, tetapi sebagian besar masih berfokus pada deskripsi masalah di sekolah tertentu atau pada aspek manajemen fasilitas secara umum. Kajian yang secara sistematis menyatukan berbagai temuan penelitian untuk memetakan pola masalah sarana dan prasarana, sekaligus merumuskan model intervensi berbasis prioritas wilayah, kolaborasi multipihak, dan pemantauan digital, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi celah tersebut melalui sintesis literatur yang lebih terstruktur.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan kerangka PRISMA untuk menyusun pemetaan masalah dan model intervensi strategis sarana-prasarana pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan persoalan yang ditemukan dalam literatur, tetapi juga menghubungkannya dengan arah kebijakan yang lebih operasional, terutama untuk sekolah-sekolah di wilayah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil sintesis terhadap 25 artikel ilmiah yang dianalisis melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR), ditemukan bahwa permasalahan sarana dan prasarana pendidikan merupakan

isu yang bersifat sistemik dan terjadi secara konsisten di berbagai wilayah, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas pendidikan tidak hanya berdampak pada aspek fisik lingkungan belajar, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kualitas pembelajaran, motivasi siswa, serta pemerataan akses pendidikan (OECD, 2019; UNESCO, 2021).

Selanjutnya, berbagai penelitian mengelompokkan permasalahan sarana dan prasarana ke dalam beberapa aspek utama, yaitu kondisi fisik bangunan, ketersediaan ruang belajar, fasilitas pendukung pembelajaran, akses teknologi, serta sanitasi sekolah (Barrett et al., 2019; World Bank, 2020).

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi realitanya masih banyak sekolah di Indonesia yang menghadapi keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana. Padahal, menurut Standar Nasional Pendidikan (SNP), institusi pendidikan atau sekolah harus memiliki gedung yang aman, ruang kelas yang cukup dan nyaman, dilengkapi dengan laboratorium, memiliki perpustakaan, serta terdapat akses listrik dan internet untuk menunjang proses pembelajaran. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi selama 5 tahun terakhir, masih banyak sekolah-sekolah khususnya di wilayah terpencil dan/atau wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang memiliki kendala dalam hal sarana dan prasarana. Permasalahan tersebut dideskripsikan dalam beberapa variabel berikut:

1. Kondisi Gedung Sekolah yang Tidak Memenuhi Standar Kelayakan

Berbagai studi menunjukkan bahwa kondisi fisik bangunan sekolah yang tidak memenuhi standar menjadi salah satu faktor

utama yang memengaruhi kualitas pembelajaran (Limbong, 2022). Infrastruktur yang rusak tidak hanya mengganggu kenyamanan belajar, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan peserta didik.

Sejumlah besar sekolah di wilayah pelosok Indonesia masih menggunakan bangunan yang berusia tua atau bersifat semi permanen. Kondisi fisik gedung yang tidak layak, seperti atap bocor, dinding yang retak, dan lantai yang tidak rata, menimbulkan rasa tidak nyaman dan bahkan kekhawatiran terhadap keselamatan bagi guru maupun peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Permasalahan ini tercermin dalam laporan detikNews (2022) yang mengangkat kondisi SDN 2 Karangpatihan di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, di mana atap sekolah yang rusak dan kayu penyangga yang lapuk memicu kekhawatiran siswa terhadap potensi kecelakaan saat hujan turun.

Permasalahan semacam ini bukanlah kasus tunggal, melainkan bagian dari gambaran menyeluruh mengenai buruknya infrastruktur pendidikan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kemendikbud dan dikutip oleh Tempo.co (2025), terdapat sekitar 10.000 sekolah di wilayah 3T yang mengalami kerusakan bangunan, baik pada kategori sedang maupun berat. Informasi ini diperkuat oleh pernyataan Vivi Andriani, Kepala Biro Perencanaan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemen Dikdasmen), dalam rapat dengar pendapat bersama Panitia Kerja (Panja) Pendidikan pada 4 Maret 2025. Ia menjelaskan bahwa dari total 20.000 satuan pendidikan di wilayah 3T, setengahnya menghadapi kerusakan infrastruktur yang signifikan.

Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi segera dari pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk memperbaiki kualitas fisik bangunan sekolah, karena keberadaan sarana belajar yang aman dan nyaman merupakan prasyarat dasar dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif.

2. Kurangnya Ruang Kelas dan Fasilitas Belajar

Di beberapa sekolah, jumlah siswa jauh lebih banyak dibandingkan ruang kelas yang tersedia. Akibatnya, ada siswa yang harus belajar dalam ruangan yang sempit atau bahkan bergantian menggunakan kelas. Selain itu, meja dan kursi yang rusak sering kali tidak diperbaiki karena keterbatasan dana. Contoh kasus yang terambil dari Kalteng Pos (2024) adalah keterbatasan ruang kelas yang membuat siswa SMPN 3 Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur harus belajar di teras sekolah. Jumlah siswa yang diterima sekolah SMPN 3 Cempaga tersebut melebihi kuota yang disediakan sehingga tidak cukup untuk menampung siswa yang harus dibagi dalam 7 ruangan kelas yang ada. Bahkan Sakarni selaku Kepala Sekolah menyatakan beberapa ruangan fasilitas seperti ruangan tata usaha, perpustakaan, dan laboratorium juga sudah dipakai untuk dijadikan sebagai ruangan belajar. Data dari Kemendikbud yang dilaporkan oleh Tempo.com (2025) juga menyatakan bahwa ribuan sekolah di daerah 3T belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas tersebut meliputi perpustakaan, ruangan kelas, dan laboratorium. Menurut catatan Kemendikdasmen (2025), terdapat 12.064 sekolah yang tidak memiliki perpustakaan dengan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencapai jumlah yang tertinggi yaitu mencapai 7.324 satuan pendidikan.

Berikutnya tercatat juga sebanyak 4.988 sekolah di berbagai jenjang yang masih kekurangan ruangan kelas; jenjang yang paling banyak adalah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 1.871 satuan pendidikan.

3. Minimnya Laboratorium dan Perpustakaan

Pelajaran sains seharusnya didukung dengan kegiatan praktik di laboratorium, tetapi banyak juga sekolah di daerah terpencil tidak memiliki fasilitas ini. Buku-buku bacaan yang seharusnya tersedia di perpustakaan pun sering kali terbatas dan membuat siswa sulit mengakses bahan bacaan yang berkualitas. Menurut laporan dan kegiatan penggalangan dana yang diselenggarakan Dompot Dhuafa (2022), sebuah sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bina Ihsani Kamancing Kabupaten Pandeglang memiliki kondisi bangunan yang sangat memprihatinkan dengan kebocoran dari berbagai sisi dan minim fasilitas. Bangunan sekolah ini tidak memiliki ruang guru dan perpustakaan. Yang lebih memprihatinkan lagi, rak buku di sekolah pun tidak ada. Dari semenjak sekolah didirikan pada tahun 2010 sampai pada 2022, kondisi bangunan sekolah belum mengalami perubahan padahal animo masyarakat sangat tinggi untuk memiliki sekolah di kawasan kampungnya. Data Kemendikbud dari laporan Tempo.com (2025) juga menyatakan masih ada 1.454 sekolah di daerah 3T yang belum memiliki laboratorium, khususnya untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

4. Akses Listrik dan Internet yang Terbatas

Penelitian oleh Yustitia et al. (2024) menunjukkan bahwa keterbatasan akses listrik dan internet menyebabkan

ketimpangan dalam penerapan pembelajaran berbasis digital, terutama di wilayah 3T.

Beberapa sekolah di Indonesia masih belum mempunyai akses listrik dan memiliki akses internet yang minim. Hal tersebut membuat siswa dan guru sulit mendapatkan informasi serta menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Menurut Radar Lambar (2024), siswa SDN Sukamaju Kabupaten Lampung Barat harus melaksanakan ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer) di rumah guru. Hal tersebut terjadi karena sekolah tersebut belum terjangkau oleh jaringan listrik dan internet karena berada di wilayah pegunungan. Kemendikbud juga memberikan data dari yang dilaporkan oleh Tempo.com (2025) bahwa masih ada 5.783 sekolah di daerah 3T yang belum mempunyai fasilitas listrik. Kemendikdasmen pun mencatat terdapat sebanyak 10.692 sekolah di Indonesia khususnya di wilayah 3T yang belum memiliki akses internet untuk menunjang kegiatan pembelajaran.

5. Sanitasi yang Buruk

Permasalahan lainnya adalah fasilitas toilet di banyak sekolah terpencil yang masih sangat terbatas. Air bersih di beberapa sekolah sulit didapat, sehingga kebersihan dan kesehatan siswa serta guru dapat terganggu. Salah satu contohnya terambil dari laporan Radar Kaur (2024) yang memberitakan beberapa sekolah di Bengkulu Selatan mengalami permasalahan sanitasi seperti keterbatasan air dan kerusakan fasilitas toilet. Wiwit Ikhsan selaku Kasi Sarana Prasarana Bidang SD Disdikbud Bengkulu selatan menyatakan ketersediaan air sumur yang belum mencukupi beserta beberapa toilet yang mengalami kerusakan menjadi penyebab kondisi buruknya fasilitas sanitasi di sekolah-sekolah daerah Bengkulu Selatan.

Menurut laporan Kompas.com (2024), Iwan Syahril (Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek) dalam Peluncuran Peta Jalan Sanitasi Sekolah 2024-2030 juga menyatakan bahwa masih ada 3,1 juta peserta didik di Indonesia yang belum memiliki fasilitas air bersih di sekolah.

Berdasarkan kelima permasalahan tersebut, dapat dipahami bahwa sarana dan prasarana memiliki peran langsung terhadap kelancaran pembelajaran dan pencapaian mutu pendidikan. Permasalahan fisik bangunan, keterbatasan ruang, kurangnya fasilitas pendukung, minimnya akses teknologi, serta buruknya sanitasi tidak dapat dipandang sebagai masalah administratif semata, tetapi berkaitan dengan hak peserta didik untuk memperoleh lingkungan belajar yang aman, sehat, dan layak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan sarana dan prasarana pendidikan secara sistematis berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu dan sumber ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran artikel pada database Google Scholar dan Scopus dengan menggunakan kata kunci: “sarana dan prasarana pendidikan”, “school infrastructure”, “educational facilities inequality”, “3T areas education”, dan “education infrastructure Indonesia”. Rentang tahun publikasi yang digunakan adalah 2018-2025 agar data yang dianalisis tetap relevan dengan perkembangan kebijakan dan kondisi

pendidikan terkini.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi:

1. artikel ilmiah yang terindeks nasional atau internasional,
2. membahas sarana dan prasarana pendidikan,
3. relevan dengan konteks ketimpangan atau kualitas pendidikan,
4. tersedia dalam teks lengkap.

Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi:

1. artikel yang tidak relevan dengan topik,
2. publikasi non-ilmiah,
3. artikel dengan data yang tidak lengkap.

Proses seleksi literatur dilakukan menggunakan pendekatan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang terdiri dari empat tahap:

1. Identifikasi: Ditemukan sebanyak ±120 artikel dari database Google Scholar dan Scopus.
2. Screening: Artikel diseleksi berdasarkan judul dan abstrak sehingga tersisa 60 artikel yang relevan.
3. Eligibility: Artikel dianalisis secara penuh berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, menghasilkan 25 artikel yang memenuhi syarat.
4. Included: Sebanyak 25 artikel digunakan sebagai sumber utama dalam analisis.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik sintesis tematik. Tahap analisis dilakukan dengan membaca artikel secara menyeluruh, mengelompokkan temuan berdasarkan tema utama, membandingkan pola

permasalahan antarartikel, lalu menyusun model intervensi strategis berdasarkan hubungan antara masalah, dampak, dan alternatif penyelesaian yang muncul dalam literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil sintesis literatur yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1 Tabel Sintesis SLR

No	Penulis & Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Relevansi
1	Hermawan (2021)	Manajemen sarpras	Pengelolaan sarpras memengaruhi efektivitas pembelajaran	Dasar teoritis
2	Limbong (2022)	Infrastruktur sekolah	Kekurangan fasilitas menurunkan mutu pendidikan	Dampak kualitas
3	Yustitia et al. (2024)	Teknologi pendidikan	Keterbatasan internet menyebabkan kesenjangan belajar	Akses digital
4	Melani & Afriansyah (2019)	Pemeliharaan sarpras	Pemeliharaan menentukan keberlanjutan fasilitas	Intervensi teknis
5	Mumiarti (2024)	Kebijakan pendidikan	Kebijakan belum merata implementasinya	Kesenjangan wilayah
6	OECD (2019)	Infrastruktur pendidikan global	Fasilitas memengaruhi hasil belajar siswa	Perspektif global
7	UNESCO (2021)	Akses Pendidikan	Ketimpangan fasilitas terjadi di negara berkembang	Keadilan pendidikan
8	Earthman (2018)	Kondisi bangunan sekolah	Lingkungan fisik memengaruhi performa siswa	Dampak lingkungan
9	Barrett et al. (2019)	Desain ruang kelas	Desain ruang belajar memengaruhi hasil akademik	Kualitas ruang
10	Filmer (2020)	Pendidikan di negara berkembang	Infrastruktur buruk menurunkan akses pendidikan	Dampak akses
11	World Bank (2020)	Infrastruktur & pendidikan	Investasi fasilitas meningkatkan kualitas belajar	Kebijakan publik
12	Glewwe & Muralidharan (2016)	Ekonomi pendidikan	Sarana pendidikan berdampak pada hasil belajar	Efektivitas kebijakan

Implikasi Sarana dan Prasarana dalam Satuan Pendidikan

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Fasilitas sekolah yang tidak memadai dapat mengganggu proses pembelajaran, mengurangi kenyamanan belajar, serta memperbesar ketimpangan akses pendidikan antardaerah. Limbong (2022) menyatakan bahwa sekolah perlu difasilitasi sesuai standar yang berlaku, termasuk ketersediaan ruang kelas yang seimbang dengan jumlah peserta didik.

Terdapat beberapa dampak dari kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam satuan pendidikan, di antaranya adalah:

1. Kualitas pembelajaran menjadi menurun karena siswa tidak dapat belajar dalam kondisi yang nyaman. Lingkungan fisik yang tidak memadai, seperti ruang kelas yang rusak atau tidak layak, terbukti memengaruhi konsentrasi dan hasil belajar siswa (Earthman, 2018; Barrett et al., 2019). Ruangan kelas yang kurang, kondisi bangunan sekolah yang tidak layak (seperti: bocor, dan mengalami kerusakan) tentunya akan menjadi penghambat kegiatan pembelajaran di sekolah. Guru dan siswa menjadi tidak fokus dalam kegiatan mengajar dan belajar. Hasil capaian pembelajaran juga menjadi tidak maksimal.
2. Minimnya motivasi belajar akibat lingkungan sekolah yang tidak mendukung. Penelitian menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan yang lengkap dan

memadai memiliki korelasi positif dengan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran (OECD, 2019). Kondisi sekolah dengan kurangnya fasilitas seperti tidak ada perpustakaan dan/atau laboratorium juga menjadi faktor berkurangnya motivasi belajar siswa. Tidak dipungkiri, sekolah dengan fasilitas yang memadai dan lengkap lebih dapat menghasilkan lulusan siswa yang berkualitas.

3. Terbatasnya akses terhadap pembelajaran berbasis teknologi akibat minimnya fasilitas pendukung seperti listrik dan internet. Keterbatasan infrastruktur digital terbukti menghambat implementasi pembelajaran berbasis teknologi serta memperlebar kesenjangan akses pendidikan, khususnya di wilayah terpencil (UNESCO, 2021; World Bank, 2020). Salah satu contohnya adalah kesulitan menerapkan kurikulum berbasis teknologi akibat keterbatasan akses listrik dan internet. Yustitia et al. (2024) menyatakan salah satu tantangan utama dalam pendidikan adalah integrasi teknologi. Masih banyak siswa yang tidak memiliki akses perangkat teknologi dan konektivitas internet yang memadai di beberapa daerah yang menyebabkan kesenjangan dan ketidaksetaraan dalam pembelajaran. Apalagi dengan adanya program ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer), seharusnya perlu adanya upaya untuk memastikan setiap siswa di seluruh daerah memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan teknologi dalam

- proses pembelajaran.
4. Rendahnya kualitas kesehatan dan kenyamanan lingkungan belajar akibat buruknya fasilitas sanitasi sekolah. Kondisi sanitasi yang tidak memadai, seperti kurangnya akses air bersih dan toilet yang layak, dapat memengaruhi kesehatan siswa serta menurunkan kehadiran dan partisipasi mereka dalam kegiatan pembelajaran (UNICEF, 2020; UNESCO, 2021). Risiko kesehatan meningkat akibat sanitasi yang buruk. Dampak dari keterbatasan air bersih dan fasilitas toilet yang rusak dan buruk tentunya sangat berdampak pada kondisi kesehatan siswa, guru, bahkan semua pihak yang ada di satuan pendidikan tersebut. Jika kesehatan siswa dan guru terganggu karena permasalahan sanitasi, otomatis proses belajar mengajar juga menjadi terhambat. Produktivitas guru dan siswa juga ditentukan dari kondisi kesehatannya.

Rekomendasi bagi Peningkatan Standar Sarana Prasarana Pendidikan

Berdasarkan hasil sintesis literatur, beberapa rekomendasi yang dapat diupayakan untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kegiatan Supervisi Pendidikan

Supervisi pendidikan merupakan suatu proses terencana yang mencakup pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan dalam

rangka meningkatkan mutu pembelajaran di lembaga pendidikan. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab, seperti pengawas sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator bidang, serta dinas pendidikan terkait. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa proses pendidikan berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Menurut Supriyadi (2019, dalam Setiawati et al., 2022), supervisi pendidikan merupakan bagian integral dari kegiatan administrasi pendidikan yang berfungsi sebagai upaya pembinaan personal bagi tenaga pendidik dan kependidikan guna meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Dalam hal ini, supervisi diposisikan tidak hanya sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai strategi pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi pendidik dan manajemen sekolah.

Suhardan (2010) mengklasifikasikan supervisi ke dalam tiga bentuk utama, yakni: (1) supervisi akademik, yang berfokus pada aspek proses pembelajaran secara langsung, (2) supervisi administrasi, yang mencermati aspek-aspek penunjang non-akademik seperti pengelolaan sarana dan prasarana dan layanan sekolah lainnya, serta (3) supervisi kelembagaan, yang menilai kinerja dan tata kelola institusi pendidikan secara menyeluruh. Dalam konteks persoalan sarana dan prasarana, jenis supervisi administrasi memiliki peran strategis dalam memastikan fasilitas pendidikan tersedia dan terkelola dengan baik.

Limbong (2022) menegaskan bahwa pelaksanaan supervisi harus memperhatikan empat tahap penting, yakni perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Dengan melaksanakan supervisi secara sistematis melalui tahapan-tahapan tersebut, serta melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan, maka berbagai permasalahan di lingkungan sekolah — termasuk keterbatasan sarana dan prasarana — dapat diidentifikasi lebih dini dan ditangani secara tepat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

2. Peningkatan Infrastruktur Sekolah di Daerah Terpencil: Prioritas Pemerintah

Pemerintah harus lebih fokus pada pembangunan infrastruktur sekolah di daerah terpencil, termasuk perbaikan gedung, pengadaan ruang kelas, serta fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih. Melani dan Afriansyah (2019) menjelaskan bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses pengelolaan dan pengaturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas pendidikan tetap dalam kondisi optimal dan siap digunakan secara efektif guna mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, pemeliharaan juga mencakup tindakan pencegahan terhadap potensi kerusakan agar fasilitas tetap berfungsi dengan baik. Dengan kata lain, pemeliharaan mencakup berbagai upaya untuk menjaga kelengkapan dan kualitas peralatan agar tetap layak digunakan. Menurut Arum, Wahyu Sri Ambar

(2007, dikutip dalam Hermawan, 2021) mengatakan bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana yang baik akan memberikan manfaat yang baik untuk negara maupun untuk pegawai. Manfaat untuk negara diantaranya adalah:

- a) Peralatan yang terpelihara baik, akan memperpanjang umurnya sehingga tidak perlukan adanya penggantian dalam waktu singkat.
- b) Pemeliharaan yang baik meminimalisir adanya kerusakan sehingga biaya pembelian juga dapat ditekan.
- c) Peralatan sarana juga dapat dikontrol dengan baik dan terhindar dari kehilangan peralatan.
- d) Pemeliharaan yang baik dapat menjadikan lingkungan pendidikan lebih nyaman, rapi, dan indah untuk dipandang.
- e) Pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik dengan adanya pemeliharaan.

Sedangkan manfaat bagi pegawai dengan adanya pemeliharaan sarana dan prasarana adalah memudahkan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

3. Mengembangkan program sekolah berbasis komunitas, di mana masyarakat setempat bisa ikut berkontribusi dalam pemeliharaan sekolah.

Salah satu pendekatan strategis dalam mencegah permasalahan sarana dan prasarana sekolah adalah dengan menginisiasi program berbasis komunitas. Dalam model ini, partisipasi aktif masyarakat sekitar baik orang tua siswa, tokoh masyarakat, maupun organisasi lokal, didorong untuk ikut

serta dalam menjaga, merawat, dan bahkan membantu perbaikan fasilitas sekolah. Kolaborasi ini tidak hanya meringankan beban sekolah, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap kualitas lingkungan belajar.

4. Memanfaatkan teknologi alternatif, seperti pembelajaran berbasis radio atau modul offline bagi sekolah yang masih minim akses internet.

Salah satu solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah, khususnya di wilayah dengan akses internet yang masih terbatas, adalah dengan mengadopsi pendekatan teknologi alternatif. Ini mencakup penggunaan media pembelajaran non-digital seperti siaran radio edukatif dan modul cetak/offline yang dapat diakses tanpa koneksi internet. Metode ini memungkinkan proses belajar tetap berlangsung secara inklusif dan merata bagi peserta didik di daerah terpencil atau terpinggirkan.

Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek ketersediaan infrastruktur, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan efektivitas pembelajaran dalam keadaan kondisi darurat atau terbatas. Radio pendidikan telah terbukti menjadi media yang efektif dalam penyampaian materi pembelajaran dengan cara yang lebih mudah diakses. Sementara itu, modul cetak dapat didesain kontekstual dan interaktif agar dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi pembelajaran mandiri di rumah.

Namun tidak dipungkiri, di era digital seperti ini ketersediaan sarana teknologi serta akses internet yang

merata sangatlah penting untuk dikembangkan. Diharapkan ke depan pemerintah bisa lebih mempercepat pembangunan infrastruktur listrik, penyediaan aksesibilitas sinyal dan internet, dan pendistribusian sarana teknologi yang merata ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia khususnya di daerah 3T.

5. Memperkuat kemitraan dengan pihak swasta dan organisasi non-pemerintah untuk penyediaan fasilitas belajar.

Kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah perlu diarahkan pada bentuk kerja sama yang konkret. Pihak swasta dapat dilibatkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk renovasi ruang kelas, pengadaan meja dan kursi, penyediaan perangkat TIK, perbaikan sanitasi sekolah, penyediaan akses internet, dan pengembangan perpustakaan digital. Sementara itu, organisasi non-pemerintah dapat berperan dalam pendampingan sekolah, pelatihan pemeliharaan fasilitas, serta pengawasan partisipatif bersama masyarakat.

Agar kemitraan berjalan efektif, diperlukan pemetaan kebutuhan sekolah, pembagian peran yang jelas, serta pelaporan hasil bantuan secara terbuka. Dengan demikian, kerja sama tidak berhenti pada pemberian bantuan sesaat, tetapi berlanjut pada pemeliharaan dan peningkatan mutu fasilitas pendidikan secara berkesinambungan.

Model Intervensi Strategis Sarana dan Prasarana Pendidikan

Berdasarkan hasil sintesis literatur, penelitian ini merumuskan model intervensi strategis yang terdiri dari tiga komponen utama berikut:

1. Prioritas wilayah. Intervensi diarahkan terlebih dahulu pada sekolah-sekolah di daerah 3T dan wilayah yang memiliki tingkat kerusakan atau kekurangan fasilitas paling tinggi. Penentuan prioritas dilakukan berdasarkan data kondisi bangunan, jumlah ruang kelas, ketersediaan laboratorium dan perpustakaan, akses listrik-internet, serta kondisi sanitasi.
2. Kolaborasi multipihak. Penyediaan sarana dan prasarana perlu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi dapat diwujudkan melalui program CSR untuk renovasi ruang kelas, pengadaan perangkat TIK, penyediaan sanitasi sekolah, bantuan buku dan perpustakaan digital, serta pendampingan pemeliharaan fasilitas.
3. Monitoring berbasis digital. Pemantauan kondisi sarana dan prasarana dilakukan melalui sistem data digital yang dikelola oleh dinas pendidikan bersama satuan pendidikan. Indikator yang dipantau meliputi kondisi gedung, ketersediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, listrik, internet, air bersih, dan toilet. Data tersebut dapat digunakan untuk menentukan prioritas bantuan, menghindari tumpang tindih program, dan mengevaluasi keberlanjutan intervensi.

Model intervensi strategis yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan sistematis antara permasalahan, strategi intervensi, dan output kebijakan

pendidikan. Model ini disusun berdasarkan sintesis tematik dari berbagai temuan penelitian, sehingga memiliki dasar empiris yang kuat.

Secara konseptual, model ini menempatkan data kebutuhan sekolah sebagai dasar pengambilan keputusan. Setelah sekolah prioritas teridentifikasi, intervensi dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dengan pembagian peran yang jelas. Selanjutnya, sistem monitoring digital digunakan untuk memantau perkembangan fasilitas secara berkala. Dengan alur tersebut, kebijakan bantuan sarana dan prasarana diharapkan lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, terdapat lima permasalahan utama sarana dan prasarana pendidikan yang banyak ditemukan pada sekolah-sekolah di daerah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu kondisi gedung sekolah yang tidak layak, keterbatasan ruang kelas dan fasilitas belajar, minimnya laboratorium dan perpustakaan, terbatasnya akses listrik dan internet, serta buruknya fasilitas sanitasi sekolah. Kelima permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan standar sarana dan prasarana masih menjadi tantangan serius, terutama pada sekolah-sekolah di daerah terpencil dan wilayah 3T.

Keterbatasan sarana dan prasarana tidak hanya berdampak pada kondisi fisik sekolah, tetapi juga berpengaruh terhadap mutu pembelajaran, motivasi siswa, kesehatan warga sekolah, serta pemerataan akses pendidikan. Sekolah yang tidak memiliki ruang belajar yang aman, fasilitas pendukung yang memadai, akses teknologi, dan sanitasi yang layak akan mengalami hambatan dalam menciptakan proses

pembelajaran yang efektif dan inklusif.

Sebagai bentuk alternatif penyelesaian, penelitian ini merumuskan model intervensi strategis yang mencakup tiga komponen utama, yaitu prioritas wilayah, kolaborasi multipihak, dan monitoring berbasis digital. Prioritas wilayah diperlukan agar bantuan diarahkan pada sekolah yang paling membutuhkan. Kolaborasi multipihak dibutuhkan untuk memperkuat dukungan pendanaan dan pelaksanaan program. Sementara itu, monitoring berbasis digital diperlukan untuk memantau kondisi sarana dan prasarana secara berkala sehingga pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan perlu dipandang sebagai bagian penting dari upaya pemerataan mutu pendidikan nasional. Pemerintah, sekolah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah perlu bekerja sama dalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan evaluasi fasilitas pendidikan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model intervensi ini melalui studi lapangan pada sekolah-sekolah di daerah 3T agar efektivitas dan kendala implementasinya dapat diketahui secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, H. (2019). *Administrasi dan supervisi pendidikan*. Padang.
- Arifin, M., & Barnawi. (2012). *Manajemen sarana dan prasarana sekolah*. Ar-Ruzz Media.
- Arum, W. S. A. (2007). *Manajemen sarana prasarana pendidikan*. MKM.
- Asri, C. B. (1995). Strategi menggunakan media pengajaran bagi pendidikan dasar. *Cakrawala Pendidikan*, 1(XIV).
- Barrett, P., Zhang, Y., Moffat, J., & Kobbacy, K. (2019). The impact of classroom design on pupils' learning. *Building and Environment*.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi ke-5). Balai Pustaka.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. (1997). *Pedoman penyelenggaraan pendidikan di sekolah*. Depdikbud.
- Dompot Dhuafa. (2022, February 21). Ada sekolah di pedalaman Pandeglang: Atas bocor air, kiri bocor angin, kanan bocor suara (Bagian satu).
- Earthman, G. (2018). *School facility conditions and student achievement*.
- Filmer, D. (2020). *Education and infrastructure in developing countries*.
- Glewwe, P., & Muralidharan, K. (2016). *Improving education outcomes in developing countries*.
- Hermawan, D. (2021). *Manajemen sarana dan prasarana*. Klik Media.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. <https://pskp.kemdikbud.go.id/standar-nasional-pendidikan-a/standar-sarana-dan-prasarana>
- Kalteng Pos. (2024, July 19). Ruang kelas terbatas, terpaksa belajar di teras. <https://kaltengpos.jawapos.com/berita-utama/19/07/2024/ruang-kelas-terbatas-terpaksa-belajar-di-teras/>
- Melani, S., & Afriansyah, H. (2019). *Manajemen sarana dan prasarana pendidikan*. Universitas Negeri Padang.
- Mulyani, L. (2020). *Manajemen sarana dan prasarana*. Academia.
- Murniarti, M. (2024). *Analisis kebijakan pendidikan*. Widina Media Utama.
- OECD. (2019). *The OECD handbook for innovative learning environments*.

- OECD Publishing.
- Radar Kaur. (2024, July 13). Sanitasi sekolah Bengkulu Selatan buruk, berikut penyebab utamanya. <https://radarkaur.bacakoran.co/read/8221/sanitasi-sekolah-bengkulu-selatan-buruk-berikut-penyebab-utamanya/15>
- Radar Lambar. (2024, October 29). Terbatas akses listrik dan internet, siswa SD di BNS gelar ANBK di rumah guru. <https://radarlambar.bacakoran.co/read/12756/terbatas-akses-listrik-dan-internet-siswa-sd-di-bns-gelar-anbk-di-rumah-guru>
- Setiawati, D., et al. (2022). *Manajemen pendidikan: Tinjauan teori & praktis di lembaga pendidikan formal*. Widina.
- Suhardan, D. (2010). *Supervisi profesional*. Alfabeta.
- Tempo.co. (2025, March 4). Kemen Dikdasmen: 10 ribu sekolah di daerah 3T rusak. <https://www.tempo.co/politik/kemendikdasmen-10-ribu-sekolah-di-daerah-3t-rusak-1215116>
- UNESCO. (2021). *Education and infrastructure development report*. UNESCO.
- World Bank. (2020). *World development report: Learning to realize education's promise*.
- Yustitia, M., et al. (2024). *Pendidikan di era digital*. CV. Edupedia Publisher.